

Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Sosial (Studi Kasus Perempuan di Desa Mandi Angin, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara)

Depi Putri^{1*}

¹Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAI Al-Azhaar
Lubuklinggau-Indonesia

Abstract

The low involvement of rural women in development aspects is a problem that has not been unraveled. so that women's aspirations have not been fully accommodated. they need to be empowered so that they can function as subjects and objects in development, both as planners, decision makers, implementers, and the community and enjoy the results of development equitably. This research focuses on empowering women in social development. This research is a qualitative research with a field approach. The focus of this research is women's empowerment. This research was conducted in Mandi Angin Village, Rawas Ilir District, Musi Rawas Utara Regency. Data collection was obtained through interviews, observation and documentation. The data analysis technique uses interactive analysis (interactive model of analysis) developed by Miles and Huberman, namely data reduction and data display. drawing conclusions (concluding drawing). Based on the results of research in Mandi Angin Village, Rawas Ilir District, North Musi Rawas Regency, the first; The people of Mandi Angin Village when viewed from the economic and social aspects, the community is at the stage of pre-prosperous families and prosperous families. Second ; The poor women in this village are caused by early marriages which have very little survival and end in divorce. In addition, there is no fixed income. Third ; Efforts made by the government such as providing capital or direct cash assistance (BLT) for the pandemic. There is no real, measurable and sustainable integrated program with relevant agencies that focuses on empowering women

Keywords: Empowerment, Women, Social Development

Rendahnya keterlibatan perempuan perdesaan dalam aspek pembangunan menjadi masalah yang belum terurai. sehingga Aspirasi perempuan belum sepenuhnya diakomodir. mereka perlu diberdayakan agar dapat berfungsi sebagai subyek maupun obyek di dalam pembangunan, baik sebagai perencana, pengambil keputusan, pelaksana, maupun masyarakat dan menikmati hasil pembangunan secara merata. Penelitian ini focus pada pemberdayaan perempuan dalam pembangunan social. Penelitian ni merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan perempuan Penelitian ini dilakukan di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara. Penggalan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis interaktif (interactive model of analisis) yang dikembangkan oleh miles dan huberman yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display). penarikan kesimpulan (concluding drawing). Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara adalah Pertama ; Masyarakat Desa Mandi Angin bila ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial, masyarakat berada ditahap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera. Kedua ; Perempuan miskin di desa ini disebabkan oleh pernikahan dini yang sedikit sekali bertahan dan berakhir dengan perceraian. Selain itu adalah tidak ada penghasilan tetap. Ketiga ; Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberian modal atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) pandemik. Belum ada program terpadu dengan instansi terkait secara nyata, terukur dan berketerusan yang focus pada pemberdayaan perempuan

Kata kunci : Pemberdayaan, Perempuan, Pembangunan Sosial

*Author Correspondence: Depi Putri, email: deviputri25@gmail.com

Copyright © 2021 Depi Putri

PENDAHULUAN

Pembangunan dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan yang hasilnya dapat dimanfaatkan oleh rakyat dengan adil dan merata. Pendekatan yang seringkali digunakan yaitu pendekatan pembangunan ekonomi. Di satu sisi pembangunan ekonomi meningkatkan pendapatan per kapita negara, tetapi dapat pula menimbulkan permasalahan sosial yang tidak dapat diabaikan. Pasalnya, pembangunan ekonomi lebih terfokus pada pengembang fisik, seperti pertumbuhan Produk Nasional Bruto (*Gross National Product/GNP*), serta pembangunan struktur dan infrastruktur. Sementara itu, pemerataan hasil pembangunan dan keseimbangan lingkungan kehidupan kurang diperhatikan, sehingga proses pembangunan justru menciptakan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, serta permasalahan sosial lainnya (Martiany,2010).

Pembangunan sosial dan upaya peningkatan kualitas hidup manusia, akan memberikan dampak yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan. Keduanya harus terlibat dalam setiap proses pembangunan, sehingga tercipta suatu kesetaraan gender. Sejak awal, dalam perencanaan pembangunan, analisa harus dilakukan berdasarkan data terpilih. Namun selama ini, perempuan sebagai bagian dari prosed dan penerima manfaat hasil pembangunan nasional, masih belum memperoleh akses maksimal, partisipasi dan kesetaraan dibanding laki-laki. Pada proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan tingkatan, keterlibatan perempuan masih rendah. Pasalnya, kualitas hidup perempuan dengan relasi gender yang masih timpang.

Tercermin dalam bidang yang diukur melalui *Gender Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measure (GEM)*.

Millenium Development Goals (MDGs) menunjukkan bahwa kesetaraan gender merupakan salah satu target yang harus dicapai pada tahun 2015. Sebagai upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Sesungguhnya keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan pembangunan perlu terus didorong. Keterlibatan tersebut bukan hanya dilibatkan secara pasif, namun sebagai pelaku aktif dan agen dalam pembangunan sosial. Pada kenyataannya data dan fakta di lapangan menggambarkan bahwa kualitas hidup perempuan yang masih rendah dan keterlibatan perempuan yang minim dalam pembangunan sosial, disebabkan karena perempuan selama ini diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya.

Ketidakadilan gender berupa marginalisasi, subordinasi, pelabelan/ stereotipe, kekerasan, dan beban ganda. Ketidakadilan gender dapat terjadi secara langsung berupa perlakuan dan sikap atau tidak langsung seperti ditemukan pada dampak sebuah kebijakan, norma, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Program pembangunan kesetaraan gender yang dirumuskan oleh para *stake holders* selama ini cenderung menempatkan perempuan sebagai obyek pasif. Pasifitas tersebut dianggap sebagai ketidakmampuan yang diakibatkan karena keterbatasan dan pengaruh peran gender yang disandangnya.

Mencermati fenomena-fenomena keperempuanan seperti yang diurai di atas mengimplikasikan suatu permasalahan yaitu seputar pemberdayaan perempuan. Pentingnya masalah pemberdayaan perempuan tersebut disebabkan pada

kenyataan bahwa masih banyak perempuan yang lemah padahal memiliki potensi untuk berdaya. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat eksternal seperti sosial budaya, kebijakan pemerintah, perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku, faktor geografis, dan kecenderungan-kecenderungan global seperti politik, ekonomi, teknologi komunikasi dan lain-lain serta faktor-faktor yang bersifat internal seperti persepsi dan konsep diri perempuan, motivasi, stres kerja, aspirasi pekerjaan, dan karakteristik-karakteristik individu lainnya. Berhubung begitu pentingnya pemberdayaan perempuan ini, maka dalam Rakernas Pembangunan Peranan Perempuan yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara Peranan Perempuan pada tahun 1999 menetapkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu dari lima agenda pokok (Kantor Menteri Peranan Perempuan, 1999).

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan nasional akan memberikan konsekuensi yang positif dalam terjadinya perubahan sosial dan peningkatan kualitas hidup bangsa. Perspektif pemberdayaan tersebut hendaknya tidak hanya menempatkan perempuan sebagai pihak yang teropresi karena konstruksi budaya dan ketidakadilan struktural, melainkan sebagai subyek pembangunan.

Dengan pemberdayaan perempuan, harapannya adalah agar mereka mendapat posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Minyalnya, punya keberanian untuk mengambil resiko dan keputusan dalam menghadapi suatu masalah. Sebab, "pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan" (Pranarka dan Moeljarto, 1996). "Pemberdayaan secara substansial merupakan

proses memutus atau *break down* dari hubungan antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (*power*) yang dimiliki obyek". Menurut Seotrisno, (1997) bahwa ada lima tugas utama perempuan yang disebut "Panca Tugas Perempuan". Kelima panca tugas itu adalah : (1) sebagai isteri supaya dapat mendampingi suami, sebagai kekasih atau sahabat bersama-sama membina keluarga yang bahagia; (2) sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda supaya anak-anak dibekali kekuatan rohani dan jasmani dalam menghadapi segala tantangan zaman dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa; (3) sebagai ibu pengatur rumah tangga supaya rumah merupakan tempat aman dan teratur bagi seluruh anggota keluarga; (4) sebagai tenaga kerja dan dalam profesi, bekerja di pemerintahan, perusahaan swasta, dunia politik, berwiraswata dan sebagainya untuk menambah penghasilan keluarga; dan (5) sebagai anggota organisasi masyarakat terutama organisasi perempuan, badan-badan sosial dan sebagainya untuk menyumbangkan tenaga kepada masyarakat.

Pemberdayaan perempuan di Desa Mandi Angin antara lain dengan menenpuh berbagai upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, sosial, budaya mereka. Oleh karena itu perlu motivasi dan adanya strategi tepat guna dan hasil guna dengan cara memberdayakan mereka. Dan mereka tidak hanya obyek pembangunan saja tetapi juga harus mampu menjadi subyek bahkan kalau mungkin menjadi aktor pembangunan desa. Harapannya dapat membebaskan mereka dari belenggu keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan. Sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan sosial dan pencapaian kesetaraan gender, perlu

dilakukan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk menganalisa bagaimanakah strategi pemberdayaan perempuan yang dapat diterapkan dalam pembanguna sosial.

METODE

Penelitian ni merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan. Fokus penelitian ini adalah Pemberdayaan perempuan Penelitian ini dilakukan di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA) dan pemilihan lokasi penelitian di desa ini berdasarkan metode purposive. Tentunya lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan-pertimbangan akademik.

Sumber data digali dengan sumber yang dapat memberikan informasi yaitu: informan. Wawancara, Observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan analisis interaktif (*interactive model of analisis*) yang dikembangkan oleh miles dan huberman (1992) yang terdiri atas tiga komponen analisis : Reduksi Data (*data reduction*), Penyajian data (*data display*). Penarikan Kesimpulan (*concluding drawing*).

HASIL

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1396 jiwa sedangkan jumlah perempuan sebanyak 1419 jiwa. Jumlah perempuan lebih besar dari pada jumlah laki-laki. Sedangkan yang sudah berumah tangga sebanyak 776 KK dengan kepadatan rumah tangga/km adalah 5m dan kepadatan penduduk/km² adalah 35%.

Tingkat Pendidikan

Kondisi masyarakat yang sangat agamis dapat digambarkan dari berbagai masyarakat lebih tertarik menyekolahkan anaknya di pendidikan keagamaan seperti MI, MTs dan bahkan mayoritas Pondok Pesantren, bahkan sampai keperguruan tinggi agama Islam dari pada mensekolahkan anaknya ke pendidikan umum. Hal itu juga didukung oleh minat masyarakat desa yang menganggap bahwa pendidikan agama dianggap sangat utama dan lebih mampu mengangkat derajat keluarga dibandingkan dengan pendidikan umum.

Lapangan Usaha/Mata Pencarian

Adapun jenis lapangan usaha yang terdapat di Desa Mandi Angin lebih banyak bergerak di bidang Perkebunan terdiri dari, Petani (Sawit, karet, dan Palawija), swasta/pegawai pabrik, pedagang, jasa dan lainnya. Penduduk di Desa Mandi Angin lebih berminat usaha di bidang pertanian, perkebunan dan perdagangan, peternakan dan jasa lainnya. Dimana hal ini dapat dilihat dari usaha perkebunan/pertanian 75 %, swasta/pegawai pabrik 25%.

Latar Belakang Kehidupan Sosial Perempuan di Desa Mandi Angin

Sebenarnya Desa Mandi Angin memiliki potensi ekonomi yang baik untuk dikembangkan, selain perkebunan kelapa sawit dan karet. Tanaman palawija, kopi, coklat dan kelapa berpotensi untuk diberdayakan. Mata pencarian utama penduduk adalah petani. Rumah penduduk rata-rata merupakan rumah panggung dan sebagian dari rumah penduduk sudah bangunan rumah minimalis.

Ada beberapa faktor penghalang yang menyebabkan mereka belum mampu berdaya, khususnya perempuan di Desa

Mandi Angin, antara lain : secara individual, secara organisasi (insti-tusi), secara kultur dan keprilakuan.

Secara individual, pendidikan perempuan di Desa Mandi Angin masih sangat rendah, karena kurangnya kesadaran perempuan akan pentingnya pendidikan.

Tabel.1 Pendidikan

Pendidikan	Persentase
Putus Sekolah	5 %
SD/Sederajat	65 %
SMP/Sederajat	15 %
SMA/Sederajat	10 %
Perguruan Tinggi	5 %

(Dokumen, 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menenga Desa (RPJMD))

Secara organisasi, terbatasnya akses perempuan dalam suatu oganisasi sehingga mereka belum mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan secara kultur atau adat istiadat perempuan tidak mendapatkan hak dan kesempatan untuk maju karena budaya patriarki yang mendominasi cara berpikir masyarakat. Jenis kelamin dapat berperan sebagai faktor penghalang, karena adanya norma-norma sosial yang mengatur peranan laki-laki dan perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berlaku secara universal adalah berdasarkan pada perbedaan ciri iologis.

Upaya Perempuan Desa Mandi Angin dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga

Tingkat pendidikan di Desa Mandi Angin sangat rendah sehingga masyarakat desa kurang memiliki kontribusi pada ruang-ruang pekerjaan yang membutuhkan

pendidikan yang lebih baik. Angkat putus sekolah dan tamat SD/Sederajat yakni 70 % dan sebagian besar dari mereka ini adalah anak-anak perempuan, mengingat orang tua mengharuskan anak-anak perempuan menikah pada usia muda serta sudah mempunyai anak. Tahapan berikutnya mencari kerja untuk menopang kebutuhan keluarga, mengingat pendapatan suami per bulan juga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga.

Umumnya kaum perempuan Desa Mandi Angin bekerja sebagai petani, swasta/ karyawan pabrik, berusaha di sektor informal seperti buka warung kecil, toko kelontong skala kecil, kios bensin dan selebihnya menganggur atau menjadi ibu rumah tangga untuk mengasuh anak-anak.

Mereka yang bekerja sebagai petani (sawit, karet dan sawah) penghasilan berkisar Rp. 600.000 – Rp. 1.750.000 per bulan, sedangkan bekerja sebagai karyawan perusahaan menerima upah Rp. 500.000 - Rp. 750.000 per bulan. Rata-rata rumah tangga penduduk di Desa Mandi Angin sebesar Rp. 1. 550.000, yang digunakan untuk kegiatan seperti; makan, sandang, pendidikan, rekreasi dan lain-lainya. Untuk mengatasi kebutuhan rumah tangga dimana penghasilan suami tidak mencukupi maka para perempuan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan bekerja membantu suami.

Upaya yang dilakukan Dalam Memberdayakan Perempuan Di Desa Mandi Angin

Program dan proyek yang langsung mengena sasaran adalah pemberian modal usaha, pemberian bibit unggul, seperti bibit bangsa Oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Musi Rawas Utara) dan Dinas Perikanan.

Pemberian modal ini selain berbentuk bibit juga berbentuk peralatan pertanian seperti mesin bajak sawah.

Organisasi perempuan seperti PKK yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan Desa yang di beri modal Rp. 4.000.000 per tahun, yang dikelola oleh anggota PKK lebih kurang 54 orang dan untuk pelatihan keterampilan dilakukan 12 kali dalam satu tahun. Pembinaan dan pelatihan secara intensif dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan mereka.

Pengorganisasian dalam konteks perubahan sosial menjadi titik strategis yang harus mendapat perhatian lebih seksama. Keberhasilan mencapai titik perubahan akan sangat ditentukan oleh pekerjaan pengorganisasian ini. Tanpa suatu pengorganisasian yang memadai, kuat dan sistematis, maka agenda pengembangan komunitas akan senantiasa bergantung kepada niat baik kekuasaan, pasar politik, atau situasi lain yang tidak pasti. Salah satunya faktor yang akan memastikan bahwa pembangunan komunitas (perempuan) berjalan dalam rel yang benar adalah kehendak dan kemampuan komunitas sendiri untuk memperbaiki keadaan.

PEMBAHASAN

Strategi Pemberdayaan Perempuan

Secara garis besar berbagai pandangan dan definisi mengenai strategi pemberdayaan. Dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer kata strategi berarti; rencana cermat tentang suatu kegiatan guna meraih suatu target atau sasaran (Peter dan Yenny, 1991). Menurut Edi Suharto (2007), strategi adalah usaha-usaha menyeluruh yang dirancang untuk menjamin agar perubahan-perubahan yang diusulkan

dapat diterima oleh partisipan atau berbagai kalangan yang akan terlibat dan dilibatkan dalam proses perubahan.

Pemberdayaan dan memberdayakan merupakan terjemahan dari kata "*empowerment*" dan "*empower*" menurut *Webster* dan *Oxford English Dictionary*, kata *empower* mengandung pengertian pertama adalah *to give power or authority to* yang artinya sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan arti yang kedua adalah *to give ability to or enable* yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan (Pranarka dan Prijono, 1996).

Pemberdayaan menurut Heru Nugroho (2004) adalah suatu proses penyadaran akan potensi atau daya yang dimiliki untuk menjadi berdaya dan diaktualisasikan dengan partisipasi melalui pendampingan untuk mentransfer pengetahuan. Pengertian pemberdayaan tersebut menekan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri (Anwas, 2013).

Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah suatu proses yang dilakukan untuk memberikan kemampuan atau kekuatan pada perempuan untuk dapat menjadi perempuan yang mandiri dengan

potensi yang ada pada diri mereka.

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau system lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individual melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien

sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Suharto,2014).

Untuk mewujudkan "masyarakat yang berdaya" terutama perempuan, diperlukan strategi - strategi yang tepat dalam melaksanakan hal tersebut, misalnya memperkuat daya saing, melindungi masyarakat agar tidak menjadi bertambah lemah. Strategi pemberdayaan masyarakat lainnya dapat berupa program - program pembangunan seperti program pembangun desa.

Pemberdayaan Perempuan

Konsep tentang pemberdayaan telah telah ditelaah dalam berbagai tinjauan. Pemberdayaan telah di definisikan sebagai suatu proses (Gutierrez, 1990), sebagai suatu intervensi (Salomo, 1976), dan sebagai suatu keterampilan. Pemberdayaan juga telah dipandang sebagai suatu strategi khusus untuk memberdayakan perempuan (Browne, 1995).

Dalam teori feminis Resemerie (1989) dalam Achmad (1994) ingin mengangkat harkat dan martabat perempuan sebagai manusia dengan tujuan akhir bagi perempuan untuk menjadi mandiri dengan cara menciptakan yang baru bagi keberadaan perempuan, menghapuskan yang tidak sesuai bagi perempuan, serta mereformasi yang tidak lurus bagi perempuan.

Konsep pemberdayaan sebagai paradigma sebenarnya juga telah dikaji oleh Moser (1993). Menurut dia bahwa inti strategi pemberdayaan sesungguhnya bukan bermaksud menciptakan perempuan yang lebih unggul dari pada laki-laki. Pendekatan

pemberdayaan ini kendati menyadari pentingnya meningkatkan kekuasaan perempuan, namun pendekatan ini lebih berupaya untuk mengidentifikasi kekuasaan bukan sekedar dalam kerangka dominasi yang satu terhadap yang lain, melainkan lebih dalam kerangka kapasitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal.

Perempuan, dalam konstruksi pemberdayaan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang tidak diuntungkan oleh praktek-praktek pembangunan. Dengan kondisi yang demikian, perempuan, dalam hal ini konsep gender yang melingkupinya, harus mendapatkan perhatian utama dalam proses pembangunan. Termasuk dalam kelompok ini selain gender adalah ras dan kelas masyarakat. Menjembatani keterbatasan kekuatan yang dimiliki perempuan serta ketidakberuntungan mereka dalam mengakses hasil-hasil pembangunan, pemberdayaan perlu diseting, dalam tiga tahapan utama, yaitu :

- 1) Kebijakan dan Perencanaan
- 2) Tindakan Sosial dan Politik serta peningkatan pendidikan dan
- 3) Kesadaran diri (Darmawan, 2008).

Pemberdayaan dalam tahap kebijakan dan perencanaan dapat dimulai dengan melakukan perubahan struktur atau lembaga untuk menjadi lebih aksesibel bagi perempuan. Kebijakan atau perangkat yang menyertainya perlu dipastikan akan memberi keuntungan bagi perempuan. Di dalam aturan dan kebijakan yang dimuat penting untuk memastikan telah terjadi perubahan struktur kekuasaan dengan keterlibatan perempuan di dalamnya. Hal tersebut menjadi sangat krusial karena kekuasaan dalam implementasinya akan selalu mengarahkan pola pikir masyarakat yang kemudian menjadi sebuah

alat bagi terciptanya dominasi.

Di samping itu adalah dalam bagian yang lain, pendidikan dan upaya-upaya membangun kesadaran perempuan terhadap konsep dan hakikat keberadaan mereka yang sebenarnya akan menjadi senjata bagi munculnya kekuatan. Namun membangun kesadaran perempuan, apa lagi dihadapkan pada kultur patriarki yang mendominasi cara berfikir masyarakat, dibutuhkan lebih dari sekedar memberikan berbagai pelatihan dengan studi kasus di dalamnya. Hakikat keadilan, sebagai muara akhir segalanya, menjadi sebuah konsep penting yang harus ditanamkan. Hal tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari level individu untuk kemudian mengarah pada upaya membangun kesadaran masyarakat secara keseluruhan.

Dalam usaha pemberdayaan perempuan, permasalahan yang paling rumit dihadapi pemerintah adalah budaya dan adat istiadat masyarakat. Di beberapa wilayah, perempuan mendapatkan posisi yang demikian penting dimata adat dan masyarakat, namun di sebagian besar lainnya, perempuan tidak mendapatkan hak dan kesempatan untuk maju. Keterbatasan disatu sisi dan tuntutan dunia terhadap *gender mainstreaming* pada akhirnya justru menempatkan program-program pemerintah sebatas dalam tahapan inisiasi di tingkat kebijakan dan *jomplang* di tingkat implementasi.

Program-program pemerintah seperti PKK, arisan dan lain-lain yang ditujukan kepada perempuan justru menjadi alat pembenar bagi ketidakadilan gender yang mendominasi. Berkaca dari permasalahan tersebut, LSM muncul dengan tawaran program pendampingan dan pelatihannya. Berbeda dengan pemerintah, patriarki justru

secara nyata ditempatkan sebagai lawan yang harus dihancurkan.

Berbagai strategi dilakukan baik melalui pemaksaan konsep-konsep keadilan gender kepada pemerintah sampai pada upaya nyata mendekonstruksikan budaya yang telah mengakar di pola pikir masyarakat. LSM menawarkan rasionalitas, membuka logika berpikir masyarakat dengan berbagai macam kegiatan. Untuk membangun kesadaran perempuan, pendampingan menjadi pilihan strategis yang paling banyak dilakukan. Namun sebagaimana disinggung di atas, LSM sering terjebak dengan apa yang disebut *universalisme perempuan*, bahwa perempuan di manapun adalah sama, selalu tertindas.

Need assessment yang dilakukan lebih pada melihat gejala-gejala dipermukaan namun kadang melupakan kenyataan yang tersembunyi. Dalam kondisi yang sedemikian pelik, sebenarnya masyarakatlah yang mampu memberikan keberdayaan bagi diri mereka sendiri. Meski tidak secara mutlak berasal dari masyarakat, kesadaran diri menjadi kunci implementasi berbagai macam program pemberdayaan. Dengan ditopang pengetahuan yang lebih lengkap mengenai potensi dan kelemahan diri sendiri, kebutuhan akan dideskripsikan dengan lebih tepat. Pemerintah mempunyai kewenangan memberikan legitimasi dan dukungan finansial, LSM kuat dalam hal ide dan gagasan, sementara masyarakat punya nilai-nilai bersama yang menjadi modal mencapai kesejahteraan bersama.

Ketika pihak-pihak yang berkompeten sudah secara nyata terlibat, kunci berikutnya yang harus dimiliki dalam membuka rantai ketidakadilan perempuan adalah partisipasi. Dalam aktivitas pemberdayaan, semua anggota masyarakat dituntut untuk terlibat

dan dilibatkan dengan harapan partisipasi tersebut dapat bermanfaat bagi keberlanjutan program ketika intervensi pihak luar berhenti. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi serta semakin aktif tingkat partisipasinya, tujuan untuk menciptakan sebuah *community based development* dalam berbagai isu di dalamnya akan dapat tercapai (Darmawan, 2008).

Dalam rangka membangun keberdayaan perempuan, organisasi atau kelompok masyarakat harus secara bijak mengartikan partisipasi. Gerakan perempuan dalam perjuangannya berbeda dengan gerakan sosial pada umumnya. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya semata perubahan nasib perempuan, melainkan juga perubahan konstruksi budaya yang ada di masyarakat. Untuk mendukung pencapaian tujuan diatas, partisipasi masyarakat secara kuantitas menjadi indikator penting yang diperhatikan.

Semakin banyak orang yang terlibat dalam gerakan perempuan, dapat diasumsikan bahwa mereka sudah paham gender dan hal tersebut tentu sangat baik bagi proses penciptaan keadilan gender bagi perempuan. Sementara itu, sebagai sebuah akhir/tujuan, partisipasi masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas mengetahui, namun saling berkompetisi dalam merumuskan program-program dan kegiatan yang bermanfaat. Untuk sampai dalam tahap ini, diperlukan sebuah ketekunan dari trainer, pendamping atau konsultan untuk terus menerus mendistribusikan pengetahuan, meningkatkan pengetahuan masyarakat sembari berkomunikasi bagaimana proses pembangunan akan dilaksanakan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk perubahan sosial, tentu tidak terlepas dari perubahan manusia itu

sendiri. Islam menawarkan konsep bahwa, manusia sebagai kunci utama dalam proses perubahan (dalam komunitas) –nya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surat Ar-Ra’du ayat 11,

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Berangkat dari berbagai pemahaman konsep pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, berikut beberapa tingkatan pemberdayaan perempuan yang dapat diterapkan dalam pembangunan sosial di Indonesia. Menurut Sara Longwe (Pemberdayaan perempuan yang dilakukan pada komunitas masyarakat harus mencakup kelima level di bawah ini:

- 1) Kesejahteraan/ pemenuhan kebutuhan dasar (*Welfare*);
- 2) Keterbukaan akses, antara lain: pendidikan, keterampilan, informasi, dan kredit (*Access*);
- 3) Kesadaran kritis (*Conscientisation*);
- 4) Pergerakan (*Mobilization*) atau partisipasi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, dan area publik/ politik; dan
- 5) Kontrol terhadap sumber daya, implementasi dalam pengambilan keputusan, dan termasuk keterwakilan dalam lembaga pengambilan keputusan (*Control*).

Pendekatan Pembangunan Perempuan

Selama ini kebijakan-kebijakan pembangunan perdesaan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Asumsi yang dijadikan rujukan utama dalam konteks ini ialah pemerintah yang paling tepat untuk

menjadi agen pembangunan dalam setiap upaya gerakan membangun perdesaan. Artinya, pemerintah memiliki peranan dan posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan masyarakat di daerah perdesaan. (Idris, Adam. Dkk. 2009)

Gerakan pembangunan perdesaan yang dilakukan selama ini dalam perkembangannya telah memunculkan tiga mode pembangunan perdesaan (Korten,1987), yaitu : (1) Model pembangunan masyarakat; (2) Model partisipasi rakyat dalam pembangunan; dan (3) Model desentralisasi.

Sejalan dengan tuntutan gerakan pembangunan perdesaan yang terus berkembang, telah memunculkan berbagai telaah kritis dalam pembangunan perdesaan diantaranya berkenaan dengan pembangunan eksistensi perempuan, sehingga pada tahun 1975 lahirlah apa yang disebut “Dasawarsa PBB untuk perempuan”.

Fenomena penggunaan model pembangunan perdesaan seperti terurai di atas, ternyata juga terjadi dalam kebijakan-kebijakan pembangunan untuk perempuan dengan munculnya beberapa pendekatan secara bergantian setelah satu pendekatan dikritik atau dinilai tidak efektif lagi. Sehubungan dengan pendekatan dimaksud, Moser (1989) menjelaskan bahwa selama dalam “dasawarsa PBB untuk perempuan” telah muncul lima pendekatan, yaitu : (1) pendekatan kesejahteraan (*welfare*); (2) pendekatan kesamaan (*Equity*); (3) Pendekatan anti kemiskinan (*Anti-poverty*); (4) pendekatan efisiensi (*efficiency*); dan (5) Pendekatan Pemberdayaan (*empower-ment*).

SIMPULAN

Pembangunan sosial sebagai upaya dalam mencapai peningkatan kualitas hidup manusia, baik laki-laki dan perempuan, merupakan suatu proses yang membutuhkan keterlibatan aktif keduanya. Pemberdayaan perempuan menjadi suatu hal yang krusial untuk mencapai kesetaraan gender sebagai salah satu indikator kualitas hidup manusia. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan dalam pembangunan sosial semestinya adalah pemberdayaan yang bersifat mendorong kesadaran perempuan akan potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Perempuan harus memosisikan diri sebagai agen perubahan sosial dengan meningkatkan partisipasi dalam pembuatan keputusan, baik ditingkat individu, keluarga, komunitas, organisasi, dan negara.

Proses pemberdayaan ini dimulai dari proses pemenuhan kebutuhan dasar, perluasan akses, munculnya kesadaran kritis, sehingga perempuan kemudian terlibat dalam pergerakan/aksi, dan memiliki kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan. Sehingga, strategi pemberdayaan perempuan yang dapat diterapkan dalam pembangunan sosial adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep Sara Longwe di atas, yaitu tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar, dan keterbukaan akses, namun sampai dengan timbulnya kesadaran kritis, aksi mobilisasi, serta memegang kontrol atas kehidupannya sendiri dan sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Mandi Angin Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara (MURATARA), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama ; Masyarakat Desa Mandi Angin bila ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial,

masyarakat berada ditahap keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera. *Kedua* ; Perempuan miskin di desa ini disebabkan oleh pernikahan dini yang sedikit sekali bertahan dan berakhir dengan perceraian. Selain itu adalah tidak ada penghasilan tetap. *Ketiga* ; Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti pemberian modal atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) pandemik. Belum ada program terpadu dengan instansi terkait secara nyata, terukur dan berkelanjutan yang focus pada pemberdayaan perempuan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S. (1994). Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan Kantor Menteri UPWRI, Jakarta.
- Adam, Idris dan Bambang, S. Dkk. (2009). Pemberdayaan Perempuan Perdesaan Dalam Pembangunan. (Studi kasus Perempuan Di Desa Samboja Kuala, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara). *Jurnal Wacana* Vol-lume 12 No. 3, Juli.
- Browne, C.V. (1995). "Empowerment in Social Work Practice with Older Woman". *Social Work*, 40, 358-364.
- Danang Arif Darmawan. (2008). *Mengikat Tali Komunitas: Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Media Wacana.
- Edi Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)* Bandung: Refika Aditama.
- Edi Suharto. (2007). *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat Tanggungjawab sosial Perusahaan. (Corporate Sosial Responsibility)* Bandung: Refika Aditama.

- Gutierrez, L. (1990). "Working with Woman of Color". *Social Work*.
- Heru Nugroho (2004) *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Krisnawaty, Tati, (1993). *Peluang kerja Perempuan Miskin dan Strategi Survive, Dalam Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif : Buku sumber tentang Metode-Metode baru*. Diterjemahkan oleh T. R. Rohidi. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Oos M. Anwas. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Pranarka dan Moeldjarto. (1996). *Pemberdayaan (Empowerment), dalam pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*, CSIS. Jakarta.
- Pranarka dan Prijono, Onny. S. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.
- Peter S., dan Yenny S.,(1991) *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.
- Sabirin,. (2008) dalam tulisanya berjudul *Pembangunan Sosial dan Pembangunan Manusia*, dimuat dalam *Jurnal PMI Fakultas Dakwah UIN SUKA*.
- Soetrisno. L. (1997). *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Kanisius.
- Sukei. K. (1999). "Beberapa alat kajian Jender Dalam Pembangunan". Makalah Yang disajikan dalam *Kajian Jender dalam Pendidikan dan Pengajaran*. Malang : Puslit-Lemlit IKIP Malang.
- Ujianto, S. Prayitno. (2010). *Pembangunan Sosial: wacana, implementasi dan pengalaman empirik*, Jakarta: P3DI.